

Kelembagaan Kelompok Tani pada Program Hutan Kemasyarakatan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegi

(Institutional Farmer Groups in the Community Forest Program at the Batutegi Forest Management Unit)

William Pangestu^{1*}, Rommy Qurniati¹, Hari Kaskoyo¹

¹Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung
Jl. Sumantri Brojonegoro, Gedung Meneng, Bandar Lampung, 35145, Lampung,
Indonesia

*E-mail: williampangestu4@gmail.com

ABSTRAK

Kelembagaan adalah aturan main yang berlaku dalam masyarakat yang disepakati oleh anggota sebagai sesuatu yang harus diikuti dan dipatuhi dengan tujuan terciptanya keteraturan dan kepastian interaksi diantara sesama anggota masyarakat. Kelembagaan memberikan pengaruh tingkat kepatuhan anggota dalam menjalankan aturan. Kelembagaan juga diharapkan mampu memberi solusi bagi petani dalam pengelolaan lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sejarah dan kelembagaan pada Gabungan kelompok tani (Gapoktan) Mahardika dan Sinar Harapan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Batutegi Provinsi Lampung. Pengambilan data dilakukan pada bulan Juli 2019 dan Maret 2021 dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam (*in depth interview*) pada beberapa informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anggota Mahardika merupakan penduduk pendatang sedangkan anggota Sinar Harapan merupakan penduduk asli yang telah menetap dan menanam kopi sejak tahun 1980. Lahan Hkm di Gapoktan Mahardika dikelola dengan mengkombinasikan tanaman kopi dengan pohon pelindung serta tanaman lainnya sedangkan di Gapoktan Sinar Harapan cenderung monokultur kopi. Kelembagaan pada Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan mempunyai beberapa kesamaan, misalnya pada pola perekrutan anggota dan frekuensi pertemuan kelompok. Namun terdapat perbedaan pada cara pengambilan keputusan dimana pada Gapoktan Mahardika dilakukan oleh ketua KTH dan ketua Gapoktan sedangkan pada Gapoktan Sinar Harapan dilakukan secara musyawarah dengan semua pengurus dan anggota.

Kata kunci: aspek kultural, aspek struktural, kapasitas kelembagaan, keanggotaan, kepemimpinan.

ABSTRACT

Institutions are the rules of the game that apply in community that are agreed upon by members as something that must be followed and obeyed with the aim of creating regularity and certainty of interaction among fellow community members. Institutions affect the level of compliance of members in carrying out the rules. Institutions are also expected to be able to provide solutions for farmers in land management in community forest programme (HKm). The purpose of this study was to identify the

history and institutions of the Mahardika and Sinar Harapan farmer groups association in the Batutegei Protection Forest Management Unit, Lampung Province. Data collection was carried out in July 2019 and March 2021 using questions and in-depth interviews with several key informants. The results showed that some of Mahardika's members were local immigrants while Sinar Harapan's members were indigenous people who had settled and planted coffee since 1980. The Hkm land in Mahardika is managed by combining coffee plants with shade trees and other plants, while in Sinar Harapan it tends to be monoculture of coffee. The institutions of Mahardika and Sinar Harapan have several similarities, for example in the pattern of member recruitment and the frequency of group meetings. However, there are differences in the way decisions are made where Mahardika is carried out by the lead of farmer group and Gapoktan while Sinar Harapan is carried out in deliberation with all group administrators and members.

Keywords: *cultural aspects, institutional capacity, leadership, membership, structural aspects.*

I. PENDAHULUAN

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan kegiatan pengendalian dan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan sebagai bagian terpadu dari sistem pertanian setempat (Soemarwoto, 2000). Masyarakat desa yang tinggal dekat dengan kawasan hutan Batutegei memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang masih tertinggal. Agar kondisi ekonomi tersebut meningkat, perlu diberikan hak pengelolaan hutan melalui program HKm agar ekonomi masyarakat meningkat menjadi lebih baik tanpa mengabaikan kelestarian hutan (Ofuoku and Chukwuji, 2012).

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Batutegei dengan luas \pm 58.174 Ha memiliki 28 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan 10 diantaranya telah mendapatkan izin pengelolaan serta sisanya sedang dalam fasilitasi pengajuan permohonan izin pengelolaan maupun dalam tahap verifikasi oleh Kementerian Kehutanan (Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei, 2014). Gapoktan yang telah mendapatkan izin pengelolaan antara lain adalah Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan. Gapoktan Mahardika berada di Resort Batulima, Pekon Sidomulyo, Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus berada di Register 32 Bukit Rinding dengan luas 2.340 Ha. Gapoktan Sinar Harapan berada di Resort Datar Setuju, Pekon Datar Lebuay, Kecamatan Air Nainingan, Kabupaten Tanggamus berada di Register 32 Bukit Rinding dengan luas 4.834 Ha.

Pelaksanaan pengelolaan lahan HKm yang dilakukan kelompok tani bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi dan sosial, tetapi harus melindungi dan menjaga areal kawasan terutama dari kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara, terutama para petani yang kehidupan sehari-harinya masih bergantung pada kawasan hutan dan sebagian kecil lainnya bekerja sebagai pegawai negeri dan sektor jasa (Raya, 2014). Pengembangan kapasitas kelembagaan kelompok tani akan membawa perubahan pada para petani anggotanya (Prasetyono, 2019).

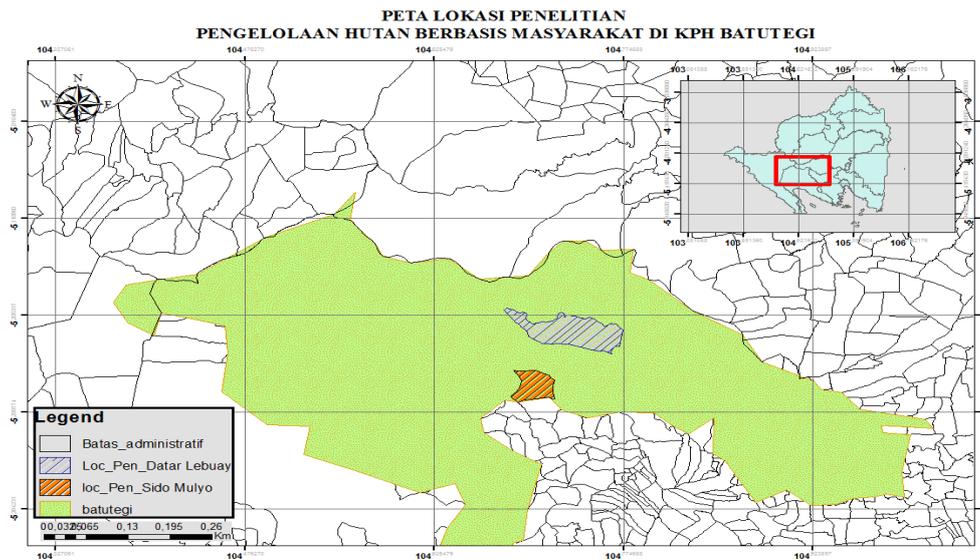
Kelembagaan merupakan aturan dan rambu-rambu sebagai panduan untuk mengatur hubungan yang saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain dalam suatu kelompok masyarakat. Penataan kelembagaan (*institutional arrangements*) dapat ditentukan oleh beberapa unsur yaitu aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya, aturan kolektif untuk menentukan, menegakan hukum atau aturan itu sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur hubungan kewenangan organisasi (Ostrom, 1990). Melalui kelembagaan masyarakat akan terjadi upaya membangun dan mengembangkan kapasitas anggota, yang melibatkan dan untuk partisipatori anggota (Adamson dan Bromiley, 2013).

Anggota Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan bermata pencaharian sebagai petani. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Qurniati dkk (2018) kedua Gapoktan tersebut memiliki pendapatan dari hasil Hkm yang sangat berbeda. Hal ini diduga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan kedua Gapoktan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sejarah dan kelembagaan pada kedua Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan di KPHL Batutegei Provinsi Lampung.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan di Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung pada bulan Juli 2019 dan Maret 2021. Peta lokasi penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Peta KPHL Batutegi.
(Figure 1. Map of KPHL Batutegi)

2.2 Alat dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa alat bantu seperti alat perekam, kamera, dan daftar pertanyaan. Objek penelitian ini adalah masyarakat sekitar hutan yang menjadi pengurus dan anggota Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan yang berpotensi dapat menjawab pertanyaan terkait penelitian.

2.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang diambil dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dengan melakukan metode wawancara secara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara mendalam (*in dept interview*) dengan beberapa informan kunci di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan. Pemilihan informan dilakukan dengan metode *snow-ball sampling* serta wawancara dilanjutkan dengan adanya observasi atau pengamatan langsung di lapangan. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi hasil wawancara, sehingga data yang diperoleh lebih akurat. Data primer terdiri dari sejarah terbentuknya Gapoktan, aktivitas pengelolaan lahan, aspek struktural, tujuan kelembagaan, keanggotaan, kepemimpinan, aspek kultural, dan kapasitas kelembagaan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi literatur dari jurnal dan buku yang terkait dengan penelitian ini. Konsep kelembagaan dan komponen data yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Rubiyanto, (2011).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Lahirnya Kelembagaan Gapoktan

Lahirnya kelembagaan Gapoktan dikarenakan adanya kesamaan kebutuhan diantara petani. Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan tumbuh berdasarkan kemauan masyarakat sendiri ditambah dengan adanya program pemerintah yaitu membentuk beberapa kelompok tani untuk pendampingan pengelolaan dan pengembangan usaha hutan rakyat. Gapoktan Sinar Harapan mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat antar anggota sedangkan pada Gapoktan Mahardika hubungannya kurang erat dikarenakan banyak anggotanya yang tidak bertempat tinggal di desa yang sama.

Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan dibentuk atas dasar keinginan masyarakat dan kedua Gapoktan mempunyai kesamaan tujuan yakni memenuhi kebutuhan hidup seperti sandang dan pangan. Sebagian lahan di kedua Gapoktan sudah ditanami tanaman tajuk tinggi yang dikombinasikan dengan tanaman kopi tetapi sebagian lagi masih *mono culture* tanaman kopi. Tanaman kopi sudah ada sejak adanya transmigran yang menetap di daerah tersebut, yaitu sejak tahun 1980 dan 1985. Kemudian terjadi pengusiran para transmigran pada tahun 1985 dan 1990. Kebun kopi yang ditanam transmigran di lahan hutan dirusak. Kejadian tersebut membuat trauma, sehingga masyarakat pergi ke daerah lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Lalu pada tahun 1992 masyarakat kembali ke lahan untuk memperbaiki tanamannya yang rusak.

Dukungan dari para pihak seperti dengan Dinas Kehutanan (Dishut) diperlukan untuk agar terjalin suatu kerjasama yang efektif dan efisien untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dengan kawasan hutan tetap lestari. Adanya kebijakan pemerintah tentang Perhutanan Sosial yang salah satu programnya adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm) mendorong masyarakat untuk mengajukan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Dari sinilah masyarakat membuat kelompok tani agar tata kelola, perizinan dan jaminan keamanan atas tanaman yang ada dilahannya dapat terwujud. Setelah dibentuknya kelompok tani dan gabungan kelompok tani, Gapoktan Mahardika mendapatkan legalitas berupa IUPHKm pada tahun 2010, sedangkan Gapoktan Sinar Harapan mendapatkan IUPHKM pada tahun 2012. Dengan adanya izin tersebut, kedua Gapoktan mulai sering mendapatkan

undangan pada acara penyuluhan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh KPHL Batutegi dan Dinas Kehutanan maupun pihak lainnya. Dari hasil penyuluhan dan pelatihan ini, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, sehingga pada lahan kelola petani yang awalnya hanya terdapat 1 jenis tanaman terjadi penambahan jenis tanaman dan pengelolaan lahan dan tanaman juga menjadi lebih baik lagi.

3.2 Aktivitas pengelolaan lahan

Aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan oleh kedua Gapoktan bermacam-macam, seperti pembersihan lahan, penyiangan, pemupukan dan penjarangan. Pada Gapoktan Mahardika penyiangan dan penjarangan tidak banyak dilakukan oleh masyarakat yang tergabung didalam Gapoktan tersebut, dikarenakan banyak pemilik lahan yang tidak tinggal disekitar hutan dan masyarakat juga tidak fokus merawat tanamannya karena bertani menjadi pekerjaan sampingan. Seharusnya masyarakat yang mempunyai lahan melakukan pemeliharaan tanaman dengan membersihkan gulma agar tidak terjadi persaingan penyerapan unsur hara didalam tanah. Pemupukan juga belum banyak dilakukan oleh anggota Gapoktan Mahardika, masyarakat masih mengandalkan bantuan pupuk dari KPHL Batutegi. Padahal pemupukan merupakan kegiatan pengelolaan lahan yang perlu dilakukan agar tanaman dapat tumbuh dengan maksimal. Berbeda dengan Gapoktan Sinar Harapan, pengelolaan lahan dilakukan secara rutin oleh masyarakat karena bertani menjadi pekerjaan utamanya. Beberapa kendala yang dihadapi kedua Gapoktan dalam pengelolaan lahan diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan lahan di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan

(*Table 1. Constraints faced in land management in Gapoktan of Mahardika and Sinar Harapan*)

No.	Uraian	Kendala	
		Gapoktan Mahardika	Gapoktan Sinar Harapan
1.	Akses jalan menuju lahan	Mudah	Sulit
2.	Hama dan Penyakit	Banyak	Sedikit
3.	Ketersediaan air	Kurang	Banyak
4.	Memperoleh pupuk	Sulit	Sulit

Kendala yang dihadapi kedua Gapoktan bervariasi tetapi kedua Gapoktan memiliki kesamaan dalam hal kesulitan memperoleh pupuk. Kesulitan untuk mendapatkan

pupuk membuat masyarakat mengajukan bantuan ke KPHL Batutegei, namun jumlah yang diterima kadang belum mencukupi dan pupuk dipasaran juga langka. Permasalahan terbesar petani di Gapoktan Sinar Harapan adalah jalan akses dari desa ke kecamatan yang cukup jauh dan kendaraan roda 4 tidak bisa melewatinya, membuat masyarakat setempat jika ingin menjual hasil panennya membutuhkan biaya dan waktu yang cukup banyak dikeluarkan.

Permasalahan hama dan penyakit tidak banyak dikeluhkan oleh anggota Gapoktan Sinar Harapan tidak seperti di Gapoktan Mahardika. Komposisi tanaman yang lebih beragam di Gapoktan Mahardika harusnya dapat mengurangi munculnya hama dan penyakit namun karena pengelolaan lahan jarang dilakukan maka hal inilah yang mendorong berkembangnya hama dan penyakit di Gapoktan tersebut. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan pelatihan tentang pengendalian hama dan penyakit tanaman dan pembuatan pupuk organik. Saat ini sebagian kecil anggota Gapoktan melakukan pengendalian penyakit dengan cara penjarangan karena jarak tanam yang terlalu rapat dapat menyebabkan pohon yang sehat menjadi tertular penyakit terutama pada tanaman kopi. Hal ini belum banyak dilakukan oleh anggota Gapoktan Mahardika karena kesibukannya pada pekerjaan lain. Untuk pemberantasan hama, masyarakat melaporkan hal ini ke KPHL Batutegei atau Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan harapan ada pendampingan untuk mengatasi permasalahan ini agar dapat mengurangi angka kematian tanaman. Permasalahan air pada Gapoktan ini, diatasi dengan dengan membuat mata air yang banyak agar tidak terjadinya kekurangan air terutama pada musim kemarau. Permasalahan yang dihadapi oleh kedua Gapoktan dapat diatasi dengan melakukan kerjasama seperti yang dijelaskan oleh Pamungkas dan Priyadi (2016) bahwa kerjasama yang dilakukan dalam bentuk bantuan fisik antara lain dapat berupa kegiatan gotong-royong membuat akses jalan menuju lahan HKm dan membuat obat pengendali hama secara bersama-sama.

3.3 Aspek struktural

Struktur kelembagaan mempunyai fungsi internal ataupun eksternal untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Struktur kelembagaan menjelaskan bagian-bagian pekerjaan dalam aktivitas kelembagaan. Fungsi internal menjadi pedoman bagi anggotanya dalam bertindak. Sedangkan fungsi eksternal menjelaskan tentang bagaimana dan siapa yang berhubungan dengan pihak luar. Hasil penelitian Irfarinda dan Lawang

(2018) mengemukakan dalam pembentukan jaringan harus sering melakukan komunikasi lalu dapat terbentuk rasa percaya dan memberikan keuntungan yang berdampak positif bagi pihak yang melakukan.

Struktur organisasi di kedua Gapoktan terdiri dari pelindung atau penasihat, ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang. Jika dibutuhkan kepengurusan tambahan maka Gapoktan akan melakukan musyawarah anggota. Pada Gapoktan Mahardika, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting dan melibatkan semua pihak, mulai dari ketua, pengurus sampai ke anggota. Sedangkan pada Gapoktan Sinar Harapan, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, namun pengambilan keputusan masih didominasi oleh pengurus yaitu ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) dan ketua Gapoktan.

3.4 Tujuan Kelembagaan

Pada masing-masing Gapoktan mempunyai beberapa tujuan, keberhasilan dan kepuasan terhadap program kelembagaan yang dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tujuan kelembagaan Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan
(Table 2. The institutions goals of the Mahardika and Sinar Harapan Gapoktan)

No.	Indikator	Tujuan Kelembagaan	
		Mahardika	Sinar Harapan
1.	Keberhasilan Program	✓	✓
2.	Keberhasilan sasaran	✓	✓
3.	Kepuasan terhadap program	-	✓

Pada kedua Gapoktan, masyarakat yang tergabung didalamnya merasakan manfaat diantaranya seperti perubahan pola pikir yang pada awalnya hanya tahu menanam dan memanen saja, tetapi sejak bergabung dalam Gapoktan, masyarakat dapat mengetahui cara penanaman, perawatan, penjarangan dan juga metode pemanfaatan lahan dengan pola agroforestri. Dengan pola ini satu petak lahan dapat ditanami berbagai jenis tanaman. Dengan begitu, cadangan makanan seperti umbi-umbian terjaga dan tanaman lainnya juga dapat menghasilkan pendapatan. Seperti yang dijelaskan oleh Indasari et.al., (2017) bahwa pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat membantu masyarakat mendapatkan sumber pencarian yang lebih beragam.

Permasalahan yang dialami masyarakat yang tergabung dalam Gapokan Mahardika dan Sinar Harapan mempunyai tanggapan yang cukup beragam, pada kebanyakan masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Mahardika merasa tidak puas karena mereka seringkali tidak mendapatkan bantuan pupuk yang diajukan, karena pupuk merupakan salah satu komoditas yang mahal dan sulit diperoleh. Ditambah lagi penyuluhan dan pelatihan belum dapat dirasakan oleh semua anggota Gapoktan. Berbeda dengan Gapoktan Sinar Harapan, secara keseluruhan masyarakatnya merasakan kepuasan terhadap program yang diberikan.

3.5 Keanggotaan

Keanggotaan pada Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan mempunyai beberapa kesamaan, misalnya pada pola perekrutan anggota yang dilakukan pada masyarakat sekitar hutan yang mempunyai lahan garapan, memiliki tanggung jawab, mengetahui peraturan yang ada, dan frekuensi pertemuan kelompok dilakukan dua kali dalam satu tahun (Tabel 3). Namun demikian terdapat perbedaan pada pihak yang mengambil keputusan di dalam gapoktan atau kelompok; pada Gapoktan Mahardika pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua KTH dan ketua Gapoktan sedangkan pada Gapoktan Sinar Harapan yang memutuskan adalah semua anggota yang hadir dalam pertemuan anggota dan secara bersama mencari solusi melalui diskusi yang dilakukan.

Tabel 3. Keanggotaan Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan.
(*Table 3. Membership of Mahardika and Sinar Harapan Gapoktan*)

No.	Keanggotaan	Gapoktan Mahardika	Gapoktan Sinar Harapan
1.	Pola perekrutan	masyarakat setempat	masyarakat setempat
2.	Pengambilan keputusan	Ketua KTH dan ketua Gapoktan	Semua ikut terlibat
3.	Kesetiaan anggota	Kurang setia	Setia
4.	Frekuensi pertemuan	Dua kali dalam setahun	Dua kali dalam setahun
5.	Partisipasi anggota	Kurang begitu aktif	Aktif

Masyarakat yang tergabung didalam Gapoktan Mahardika dinggap kurang memiliki kesetiaan terhadap lahan kelolanya. Jarak antara desa dan kecamatan yang cukup dekat membuat anggota banyak meninggalkan lahan dan mencari pekerjaan lain

seperti PNS, guru dan lain lain. Masyarakat kembali ke lahan garapan hanya pada saat panen saja yang membuat hasil panen menjadi kurang maksimal. Hal ini yang menyebabkan masyarakat kurang aktif dalam kegiatan yang ada di Gapoktan Mahardika. Untuk itu ketua Gapoktan harus membuat kebijakan jika pada saat rapat pertemuan ada yang berhalangan hadir, maka paling tidak dapat diwakili oleh salah satu anggota keluarga. Lain halnya dengan masyarakat di Gapoktan Sinar Harapan yang aktif mengikuti kegiatan yang diadakan Gapoktannya. Masyarakat yang tergabung dalam Gapoktan Sinar Harapan banyak menghabiskan waktu dilahan karena tidak mempunyai pekerjaan lain selain bertani sehingga lahan garapannya bersih dari rerumputan serta hasil panen tinggi.

Masyarakat serta seluruh anggota mempunyai kesempatan yang sama untuk mengambil keputusan yang berhubungan langsung dengan keberlangsungan program program Gapoktan Sinar Harapan. Hal terpenting dalam keberhasilan mencapai tujuan suatu Gapoktan yakni kepemimpinan yang baik dan kinerja yang baik maka dapat menghasilkan hasil yang baik pula.

3.6 Kepemimpinan

Tabel 4 menunjukkan bahwa pemilihan pemimpin atau anggota disetiap Gapoktan mempunyai cara yang berbeda, jika di Gapoktan Mahardika ditunjuk seseorang yang paling berpengalaman, karena masyarakat sekitar menganggap, orang yang paling berpengalaman itulah yang dapat membimbing anggotanya dengan benar. Lain halnya di Gapokran Sinar Harapan yang lebih memilih melakukan musyawah atau voting untuk mendapatkan seorang pemimpin. Dalam hal kekuasaan, masyarakat sekitar menganggap pemimpin di Gapoktan Mahardika belum begitu efektif dalam menangani permasalahan yang ada, seperti kekurangan pupuk, yang seharusnya diusut sampai tuntas kenapa jumlah yang diterima berbeda dengan jumlah yang diajukan. Berbeda dengan pemimpin di Gapoktan Sinar Harapan yang menurut masyarakatnya mempunyai pandangan efektif, karena seringnya terjun langsung dan sering sosialisasi ke semua KTH-nya.

Tabel 4. Karakteristik kepemimpinan di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan.
(*Table 4. Characteristics of leadership in Mahardika and Sinar Harapan Gapoktan*)

No.	Kepemimpinan	Gapoktan Mahardika	Gapoktan Sinar Harapan
1.	Landasan Pemilihan	Ditunjuk seseorang yang paling berpengalaman	Musyawarah, yang dipilih masyarakat melalui voting
2.	Kekuasaan pemimpin	Belum efektif	Efektif
3.	Gaya kepemimpinan	Membagi tugas	Mengarahkan
4.	Periode pemilihan	10 tahun	13 tahun

Gaya kepemimpinan pada Gapoktan Mahardika dan Gapoktan Sinar Harapan berbeda. Pemimpin di Gapoktan Mahardika membagi tugas ke pengurus dan anggotanya, sedangkan pemimpin di Gapoktan Sinar Harapan lebih mengarahkan anggotanya dalam hal tugas yang harus dilakukan. Masa jabatan ketua di kedua Gapoktan berbeda pula, pada Gapoktan Mahardika memiliki masa jabatan 10 tahun, sedangkan Gapoktan Sinar Harapan mempunyai masa jabatan yang lebih panjang, yakni 13 tahun.

3.7 Aspek kultural

Sistem tata nilai, norma, dan kultur yang terdapat di kedua Gapoktan cukup baik karena mengandung kepercayaan yang ditinggalkan serta masih diterapkan di kehidupan yang sekarang (Tabel 5). Sistem tata nilai merupakan komponen kebudayaan. Sistem tata nilai yang tertanam di kedua Gapoktan tersebut terlihat dari jarang adanya selisih paham antar anggota, lalu berperilaku baik, dan sifat gotong-royong yang tertanam dalam diri disertai semangat kerja keras. Nilai-nilai yang masyarakat ajarkan ke anaknya sudah memiliki cara berpikir yang maju, dimana anak-anak memiliki cita-cita keluar dari desa untuk sekolah, kuliah, dan mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya untuk bekal mengembangkan desa dengan ilmu yang dimilikinya.

Tabel 5. Aspek Kultural di Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan.
(*Table 5. Cultural Aspects in Mahardika and Sinar Harapan Gapoktan*)

No.	Aspek Kultural	Gapoktan Mahardika	Gapoktan Sinar Harapan
1.	Sistem tata nilai	✓	✓
2.	Norma	✓	✓
3.	Kultur	✓	✓

Norma adalah aturan sosial baik tertulis maupun tidak tertulis. Norma tertulis biasanya dari peraturan resmi pemerintah, sedangkan tidak tertulis berisi pantangan adat-istiadat setempat. Norma juga biasa disebut sebagai perilaku. Norma dalam kelembagaan dipengaruhi karena tatanan nilai yang ada di lingkungan kemasyarakatan. Norma agama yang diterapkan di kedua Gapoktan relatif sama. Anggota kelompok yang seagama dapat berbagi nilai-nilai yang diakui dan diyakini bersama berdasarkan norma-norma agamanya (Qurniati et.al., 2017). Nilai-nilai ini sudah dilakukan turun-menurun seperti membantu sesama, terutama anggota Gapoktan yang sedang mengalami musibah seperti jika ada anggota keluarganya meninggal dunia maka masyarakat membantu mulai dari hari pertama, *tahlilan* (pengajian) 3 harian, 7 harian dan 40 harian.

Anggota dari Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan mengetahui peraturan yang ada, namun pada beberapa anggota Gapoktan Mahardika seringkali melakukan pelanggaran kecil. Anggota Gapoktan yang melanggar akan dikenakan sanksi. Kedisiplinan lainnya dari anggota Gapoktan terlihat dari semangat bekerja dan pengerjaan lahan yang baik, terlihat seperti lantai lahan yang bersih dan hasil panen yang banyak, serta selalu hadir dan berpartisipasi saat ada agenda pertemuan kelompok.

Kelembagaan pada Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan memiliki peran bagi masyarakat, yakni dapat mengubah pola pikir masyarakat dan membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun jika ada kendala dan kesulitan, maka masyarakat akan dikumpulkan dan mencari solusi yang terbaik bersama-sama. Selain itu, kelembagaan pada Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan berperan sangat penting jika ada konflik diantara anggota Gapoktan, baik yang terjadi didalam kelompok maupun yang terjadi diluar kelompoknya. Namun sampai saat ini, belum pernah terjadi konflik diluar kelompok. Kelembagaan pada Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan memberikan hak penuh kepada anggotanya untuk menjual dan mengolah hasil panen mereka. Namun hanya sedikit petani yang dapat bekerjasama dengan perusahaan, sampai saat ini pun kebanyakan petani masih mengeluhkan sulitnya pemasaran. Kelembagaan Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan membantu petani dalam hal pemberian subsidi pupuk yang berasal dari pemerintah. Namun, subsidi yang diberikan belum menjangkau semua anggota karena keterbatasan pupuk

yang masih minim. Pada akhirnya masyarakat membeli pupuk yang jaraknya cukup jauh dari desa dan cukup mahal harganya.

IV. KESIMPULAN

Gapoktan Mahardika dan Sinar Harapan dibentuk atas dasar keinginan masyarakat sendiri dan kedua Gapoktan mempunyai kesamaan tujuan yakni memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah yang melibatkan seluruh anggota kelompok tani, anggota kelompok tani memiliki sistem tata nilai luhur yang dicirikan dengan persepsi sebagian besar anggota terhadap hakekat hidup adalah baik, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, berorientasi ke masa depan, dan menjunjung tinggi keselarasan dengan alam dan lingkungannya. Kapasitas kelembagaan kelompok tani dalam hal penyelenggaraan penyuluhan serta pengadaan pupuk dan bibit.

V. SARAN

Pengelolaan lahan HKm perlu ditingkatkan pada kedua Gapoktan. Pada Gapoktan Mahardika pertemuan harus sering dilakukan karena sebagian besar pemilik lahan bukan masyarakat setempat. Selain itu untuk kedua Gapoktan perlu dilakukan pendekatan pendidikan kepada anggota kelompok tani melalui penyuluhan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan dan tanaman khususnya penanganan hama dan penyakit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamson, D., & Bromiley, R. (2013). Community empowerment: learning from practice in community regeneration. *International Journal of Public Sector Management*, 26(3), 190–202.
- Indasari, D., Wulandari, C., Bintoro, A. 2017. Pengembangan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu Oleh Kelompok Sadar Hutan Lestari Wana Agung di Register 22 Way Waya Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Sylva Lestari*. 5(1): 81-91 hlm.
- Irfarinda, M. dan Lawang, MZ. R. 2018. Mutual trust between scavengers and collectors in bekasi region: social capital perspective. *Jurnal Sosio Konsepsia*. 7(3):1-14

- Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei. 2012. *Rencana Pengelolaaan Hutan Jangka Panjang*. Buku.Kesatuan Pengelolaan Hutan Batutegei. Lampung. 254 hlm.
- Ofuoku, A.U. and Chukwuji, C.O. 2012. *Farmers' Groups Growth Trend in Delta State*. Global Journals, Nigeria.
- Ostrom, E. 1990. *Governing the Commons*. The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press.
- Pamungkas, B. S. dan Priyadi, P. B. 2018. Analisis modal social dalam pengelolaan desa wisata nongkosawit kota semarang. *Journal of Public Policy and Management*. 7(4): 1-13
- Prasetyono, D.W. 2019. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Tani sebagai Pilar Pemberdayaan Petani. Prosiding PKM-CSR. 2(2019): 1285-1293.
- Qurniati, R., Duryat. dan Riniarti, M. 2018. *Pendapatan Petani Setelah Mendapatkan Ijin Hutan Kemasyarakatan*. Laporan Penelitian. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 23 halaman.
- Qurniati, R., Hidayat, W., Kaskoyo, H., Fidasari. & Inoue, M. 2017. Social capital in mangrove management: A case study in Lampung Province, Indonesia. *Journal of Forest and Environmental Science*, 33(1), 8-21.
- Raya, A.B. 2014. Farmer Group Performance of Collective Chili Marketing on Sandy Land Area of Yogyakarta Province Indonesia. Canadian Center of Science and Education. Japan.
- Rubiyanto, M.A. 2011. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Desa Buniwangi Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Skripsi. Program Studi Kehutanan, Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Soemarwoto, O. 2000. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.